

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU
DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister
Program Magister Kenotariatan



Oleh :

HENDY PRASTYO

NIM. S.351508023

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU
DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT**

**DISUSUN OLEH :
HENDY PRASTYO**

**NIM :
S351508023**

Telah disetujui oleh Pembimbing :

Jabatan

Nama

Tanda tangan

Pembimbing

Dr. Mulyoto, SH., M.Kn

Tanggal *19 Desember 2017*



Mengetahui :

Kepala Program Magister Kenotariatan



Burhanudin Harahap, SH., MH., MSI., Ph.D

NIP. 196007161985031004





**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU
DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT**

**DISUSUN OLEH :
HENDY PRASTYO**

NIM :

S351508023

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19641201 200501 1 001		19 Des 2017
Sekretaris	<u>Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn</u>		19 Des 2017
Penguji 1	<u>Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum</u> NIP. 197805012003121002		19 Des 2017
Penguji 2	<u>Dr. Widodo T. Novianto, S.H., M.Hum</u> NIP. 195411241985031002		19 Des 2017

Mengetahui :


**Direktur Progam
Pasca Sarjana**

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 19600727 1987021 001


**Ketua Progam Studi
Magister Kenotariatan**

Burhanudin H., SH., MH., MSI., Ph.D
NIP. 19600716 198503 1 004

PERNYATAAN

NAMA : HENDY PRASTYO

NIM : S351508023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



HENDY PRASTYO

MOTO

Sesungguhnya ALLAH tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka.

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

Jangan pernah kamu tinggalkan sholat mu nak.

(Edy Sucipto)

Tidak ada keburukan di dunia ini, tergantung bagaimana cara pandang untuk memaknainya.

(Hendy Prastyo)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembhakan untuk

1. Kedua Orang Tuaku, Edy Sucipto (Alm) dan Sriyatun terima kasih atas doa dan restu yang selalu engkau berikan.
2. Kedua kakakku Iput Lanjar Hastuti dan Dhonik Asrudin terima kasih atas pembelajaran yang kalian berikan.
3. Istriku Chornilia Ayu Witaryanti terima kasih untuk support nya.
4. Alamamaterku tercinta, Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, dengan judul: **AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT.**

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Bapak Prof. Dr. Supanto., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Burhanudin Harahap., S.H., M.H., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Bapak Dr. Mulyoto., S.H., M.Kn. selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan, ilmu dan doa dalam penyusunan tesis ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik;
7. Kedua orang tuaku Edy Sucipto (Alm) dan Sriyatun yang telah memberikan restu, doa, kasih sayang, dukungan, semangat, dan semua yang telah beliau berikan;
8. Kedua kakakku Iput Lanjar Hastuti dan Dhonik Asrudin yang telah memberikan pembelajaran, doa, dan dukungan;
9. Keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang;
10. Teman-Teman Kelas A Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Abdul Kholiq I, Ardhi Satria, Citra Amira Z, Damaiana, Dicky Sheri A, Dimas P, Dwi Utomo, Epifanius Ivan, Eunike Freskilia S.P, Fauziah Rizkiani, Giovanni Agnelli S, Kadek Endra B.S, Nanda Tri B, Novita Alfiani, Priyo

Handoko, Reynaldo Harrison H, Rizky Arditya C.N, Taffarel Satyo L, Tommy Theodore F, dan Wendy Prudensia R terima kasih untuk belajar bersama, senang, sedih, bermain, waktu, dan motivasinya dan telah memberikan dukungan semoga setelah ini kita semua menjadi Notaris yang dilancarkan dan diberkahi Allah SWT,

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan VII Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, terima kasih untuk pembelajaran, kerjasama, dukungan dan semangat;
12. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan untuk berproses dan pengalaman berorganisasi kepada penulis selama mengikuti studi di Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan

Surakarta,

Penulis

Hendy Prastyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kerangka Teori	8
1. Tinjauan Umum Tentang Notaris	8
a. Sejarah dan Pengertian Notaris	8
b. Tugas dan Kewenangan Notaris	12
c. Tanggung Jawab Notaris	16
2. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	24
a. Pengertian Akta Otentik	24
b. Syarat Akta Otentik	27
c. Macam Akta Otentik	30
d. Kekuatan Pembuktian Akta	31
3. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	34
a. Pengaturan dan Konsep Dasar Kepailitan	34

b. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	45
c. Tata Cara Permohonan Kepailitan	52
B. Kerangka Berpikir	57
C. Penelitian yang Relevan	58
D. Teori Analisis	59
1. Teori Positivisme	59
2. Teori Efektifitas	61
3. Teori Tanggung Jawab	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
1. Jenis Penelitian	64
2. Sifat Penelitian	64
3. Pendekatan Penelitian	65
4. Sumber Data Penelitian	65
5. Teknik Pengumpulan Data	66
6. Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Notaris Dijatuhi Putusan Pailit	68
B. Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Setelah Dinyatakan Pailit	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Implikasi Hukum	94
C. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR GAMBAR

Kerangka berpikir	57
-------------------------	----

ABSTRAK

Hendy Prastyo, S351508023, AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DI HADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT, 2017, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum dinyatakan pailit, dan tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan metode analisis interpretasi.

Putusan pailit dari Pengadilan Niaga dapat diberikan kepada Notaris yang merupakan pejabat umum pembuat akta otentik, jika telah memenuhi persyaratan yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun jika Notaris pailit secara materiil, maka Notaris tidak bisa dijatuhi putusan pailit, karena tidak memenuhi adanya unsur debitor dan 2 (dua) kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pemberian putusan pailit kepada Notaris oleh Pengadilan Niaga menyebabkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, sebagaimana termaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi pailit notaris berdasarkan keadaan yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap otentisitas akta notaris, dan akta tersebut tetap mempunyai kekuatan sebagai akta otentik. Notaris yang sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga namun masih membuat akta, maka akan mendapat sanksi secara perdata dan sanksi secara administrasi.

Kata kunci : akta; notaris; pailit

ABSTRACT

Hendy Prastyo. S351508023. DUE TO LAW DEED MADE BY OR BEFORE THE NOTARY AFTER BEING DECLARED BANKRUPT. 2017. Tesis: Master of Notary Program Sebelas Maret University.

The purpose of writing this article isto know and anlyze about the authentication power of an authentic deed made by a notary after being declared bankrupt by the commercial court, and whether a notary who is a pubilc official of the state may be declared bankrupt.

Research methods used to achieve the objectives of this legal research using normative jurudical approach method. The data analysis technique used in this research is using descriptive analysis method approach which then cantinued with method of interpretation analysis.

The bankruptcy decision of the commercial court may be granted to a notary who is an authoritative public official of an authentic deed, if it satisfies the requirements contained in Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. But if the notary is bankrupt materially, then the notary can not be sentenced to bankruptcy, because it does not fulfill the debtor element, and 2 (two) creditors whose one debts have fallen and can be collected. The granting of a bankruptcy decision to a notary by the commercial court causes a deed made by or before a notary to have only power as an article under the hand, as referred ti in Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. But a notary bankruptcy based on circumstances which actually have no effect on the authenticity of notary deed, and the deed still has the power as an authentic deed. A notary who has beeb declared bankrupt by the commercial court but still makes the deed, it will be sanctioned civil and administrative sanctions.

Keywords : deed; notary; bankruptcy